

**BAB IV**

**PROSES ADVOKASI INSTITUT PELANGI PEREMPUAN (IPP) DALAM  
MEPERJUANGKAN HAK-HAK KAUM LGBT MENGENAI *SEXUAL  
ORIENTATION AND GENDER IDENTITY (SOGI)* MELALUI *YOGYAKARTA  
PRINCIPLES***

Advokasi adalah sebuah tindakan atau upaya yang dilakukan untuk memperbaiki atau merubah kebijakan publik agar sesuai dengan kehendak atau kepentingan mereka yang mendesakkan terjadinya perubahan tersebut.<sup>1</sup> Advokasi bukanlah proses revolusi yang bertujuan untuk merebut kekuasaan politik kemudian melakukan perubahan secara keseluruhan sistem dan struktur masyarakat, tetapi advokasi didasarkan pada asumsi bahwa perubahan tersebut lebih luas yang dapat dilakukan melalui perubahan-perubahan kebijakan publik secara bertahap.<sup>2</sup> Hal tersebut sudah menjelaskan bahwa tujuan utama dari advokasi adalah terjadinya perubahan pada kebijakan publik.

Salah satu model advokasi yang sering dilakukan oleh organisasi internasional adalah TAN atau *Transnational Advocacy Network*. TAN merupakan sebuah jaringan aktifitas advokasi yang melibatkan aktifis dari dua atau lebih negara yang bekerja bersama-sama untuk mencapai sebuah tujuan atau aktifis di sebuah negara yang membentuk jaringan dengan aktifis di negara lain.<sup>3</sup> Jaringan ini muncul karena tertutupnya akses antara masyarakat sipil dan pemerintah sehingga sangat sulit untuk merubah perilaku sebuah negara. Tertutupnya akses antara pemerintah dan masyarakat sipil tersebut lah yang membuat pihak lain untuk mencari jalan pintas dengan membuat sebuah jaringan yang dapat menyampaikan tujuan mereka.

---

<sup>1</sup> Nur Azizah. " *Advokasi Kuota Perempuan di Indonesia* ", *Op. Cit.*

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> *Ibid.*

Jaringan ini dapat melibatkan berbagai aktor, mulai dari kalangan NGO, intelektual, gerakan sosial, media massa, politisi dan kadangkala pejabat baik yang berada di dalam negeri maupun diluar negeri.<sup>4</sup> Dari sekian banyak aktor yang dapat terlibat, saat ini masih didominasi oleh organisasi internasional atau NGO. Organisasi internasional tersebut membangun sebuah jaringan agar lebih mudah menyampaikan tujuan yang ingin mereka capai. Cara yang digunakan oleh organisasi internasional adalah bekerja sama dan saling bertukar informasi dengan organisasi lokal untuk mempengaruhi kebijakan publik negara tersebut.

Institut Pelangi Perempuan (IPP) sebagai salah satu organisasi yang memfokuskan diri pada kesetaraan gender tentunya akan menggunakan segala instrumen yang berkaitan dengan tujuannya dalam mewujudkan kesetaraan gender. Salah satu instrumen yang digunakan oleh IPP adalah *Yogyakarta Principles* yang berkaitan dengan orientasi seksual dan identitas gender dimana itu juga merupakan salah satu alat IPP dalam mengkampanyekan laum LGBT maupun hak-haknya.

*Yogyakarta Principles* adalah sebuah tatanan prinsip-prinsip dalam penerapan Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang terkait dengan orientasi seksual dan identitas gender.<sup>5</sup> Prinsip-prinsip ini menegaskan standar hukum internasional yang mengikat dan harus dipatuhi oleh semua negara. Hal tersebutlah yang dimanfaatkan oleh IPP untuk menggunakan *Yogyakarta Principles* sebagai instrumen dalam memperjuangkan kesetaraan gender, terutama untuk memperjuangkan hak-hak kaum LGBT di Indonesia.

#### **A. Institut Pelangi Perempuan (IPP) Membangun Jejaring Advokasi Transnasional**

Institut Pelangi Perempuan (IPP) membangun sebuah jejaring advokasi transnasional akibatnya tertutupnya akses kepada pemerintah Indonesia sehingga dengan

---

<sup>4</sup> Nur Azizah. "Advokasi Kuota Perempuan di Indonesia", *Op. Cit.*

<sup>5</sup> Michael O'Flaherty dan John Fisher. "Sexual Orientation, Gender Identity and International Human Rights Law: Contextualising the Yogyakarta Principles." *Op. Cit.*

adanya sebuah jaringan diharapkan akan adanya desakan dari organisasi maupun pemerintah negara lain yang lebih dapat menerima isu LGBT.

### **1. Institut Pelangi Perempuan (IPP) dengan *International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans, and Intersex Association (ILGA)***

IPP merupakan sebuah organisasi NGO non-profit yang menjadi pusat kegiatan dan informasi bagi kelompok perempuan LBT (Lesbian, perempuan Biseksual, dan Transgender perempuan ke laki-laki) muda di Indonesia.<sup>6</sup> Strategi yang diusung oleh IPP dalam memperjuangkan hak-hak seksualitas lesbian adalah memberdayakan potensi dan sumber daya LBT muda Indonesia guna mewujudkan tatanan masyarakat demokratis yang tidak diskriminatif terhadap preferensi seksual berbeda.<sup>7</sup>

Ketertarikan ILGA untuk membangun sebuah jaringan dengan IPP adalah karena keunikan IPP dalam memperjuangkan hak kaum LGBT. IPP menggunakan media komik yang mungkin selama ini tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Komik menjadi sebuah hal baru dalam perjuangan para aktivis yang peduli akan hak kaum LGBT.

Komik tersebut tidak lah terdengar aneh mengingat IPP selalu bekerja dengan menggunakan motto "*EDUFUNTAINTMENT*" atau *Education, Fun, and Entertainment*. IPP memang sering menyalurkan aspirasi mereka ke dalam sebuah karya daripada melakukan kampanye secara langsung, seperti contohnya dalam bentuk puisi, cerpen, buku, film, dan pertunjukan (tarian, operet, dll).<sup>8</sup> IPP juga tidak

---

<sup>6</sup> Institut Pelangi Perempuan. "*Profil*", diakses melalui <http://www.pelangiperempuan.or.id/profil/> pada 13 Maret 2017.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*

menutup kemungkinan dalam melakukan kampanye secara langsung atau hanya sekedar untuk berdiskusi dengan organisasi lain maupun dengan masyarakat sipil.

Komik yang dikeluarkan oleh IPP bernama *Komik Yogyakarta Principles*. Komik tersebut memang mengadopsi *Yogyakarta Principles* sebagai tema dalam pembuatannya. Untuk ceritanya sendiri, *Komik Yogyakarta Principles* bercerita mengenai pengalaman hidup sesungguhnya dari beberapa lesbian muda yang juga menjadi anggota dari IPP sendiri.

Dalam komik ini menjelaskan prinsip-prinsip HAM yang terkait dengan orientasi seksual dan identitas gender. komik tersebut tidak sepenuhnya mengadopsi ke-29 prinsip yang ada dalam *Yogyakarta Principles*, namun prinsip yang digunakan hanyalah prinsip-prinsip yang berhubungan dengan kehidupan kaum LGBT muda seperti hak untuk pendidikan, hak untuk kesetaraan dan *non-diskriminasi* atau hak untuk kebebasan dalam beropini dan berekspresi.

Komik ini secara resmi diluncurkan pada 29 Oktober 2010 di beberapa kota di Jakarta (Apollo Bar, Kuningan, Jakarta Selatan), Bandung, dan Yogyakarta.<sup>9</sup> Dalam acara peluncuran tersebut juga dihadiri oleh organisasi LGBT maupun organisasi non-LGBT lainnya seperti Arus Pelangi, Ardhanary Institut, Yayasan Srikandi Sejati, Yayasan Damar Lampung, Kontras, Ikohi, Suara Mahardika, LBH Jakarta, Suara Ibu Peduli, dll.<sup>10</sup>

Setelah peluncuran tersebut Komik Yogyakarta Principles banyak mendapatkan tanggapan positif baik dari sesama organisasi maupun dari masyarakat. IPP telah menerima penawaran dari para aktivis di Brazil, Argentina,

---

<sup>9</sup> Institut Pelangi Perempuan. “*Komik Yogyakarta Principles*”, diakses dari <http://www.pelangiperempuan.or.id/buku/komik-yogyakarta-principles/> pada 13 Maret 2017.

<sup>10</sup> *Ibid.*

China, Thailand, Taiwan, Turki, dan Pakistan. Pada saat *peringatan IDAHO (International Day Against Homophobia dan Transphobia)* tahun 2012, IPP bekerjasama dengan organisasi LGBT Belgia *Rainbow House* dan *Tels Quels* untuk meluncurkan *Komik Yogyakarta Principles* dalam bahasa Belanda dan Perancis pada tanggal 15 Mei 2012 di Brussels, Belgia yang juga dihadiri oleh *State Secretary of Brussels*, Bruno De Lille.<sup>11</sup>

Banyaknya permintaan dan adanya kerjasama dengan organisasi lain tersebut tidak terlepas dari peran ILGA yang mempunyai jaringan yang luas dengan berbagai macam organisasi di seluruh dunia. ILGA memanfaatkan fungsi informatifnya sebagai organisasi internasional<sup>12</sup> dengan cara menyebarkan berbagai data dan fakta yang telah didapatkan sebagai upaya dalam mewujudkan tujuannya.

## **2. Institut Pelangi Perempuan (IPP) dengan *Exploratory Research on Internet and Sexuality (EROTICS)***

Institut Pelangi Perempuan sebagai salah satu organisasi yang peduli akan kaum LGBT tentunya akan melakukan segala cara agar kaum LGBT mendapatkan haknya. Akibat belum dilegalkannya LGBT di Indonesia, banyak terjadi pelanggaran diberbagai konteks yang menyebarkan isu LGBT. Salah satunya adalah melalui konteks teknologi informasi. Banyak situs web yang dilarang di Indonesia, terutama situs web yang mendukung maupun yang menyebarkan isu LGBT.

Dalam menghadapi hal tersebut, IPP bekerjasama dengan *Exploratory Research on Internet and Sexuality (EROTICS)* untuk mengupayakan dicabutnya

---

<sup>11</sup> Institut Pelangi Perempuan. “*Komik Yogyakarta Principles Diluncurkan di Brussels, Belgia*”, diakses dari <http://www.pelangiperempuan.or.id/berita/komik-yogyakarta-principles-diluncurkan-di-brussels-belgia/> pada 13 Maret 2017.

<sup>12</sup> Harold K. Jacobson. “*Network of Interdependence: International Organizations and The Global Political System*”, *Op. Cit.*

larangan diberbagai web yang mengandung konteks LGBT. EROTICS merupakan jaringan internasional yang bekerja dibawah koordinasi dari *Association for Progressive Communication (APC)*, sebuah organisasi internasional yang bekerja dalam lingkup penelitian, advokasi kebijakan, dan kampanye mengenai hak internet sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia.<sup>13</sup>

EROTICS membantu IPP dalam upaya pelegalan segala situs web yang mengandung konteks LGBT. Kedua organisasi ini berusaha untuk mempengaruhi provider di Indonesia yang melarang konten LGBT. Sejak Mei 2011, tiga provider Indonesia (Telkomsel, IM2 Indosat, dan Lintasarta) melakukan pemblokiran berbagai situs LGBT.<sup>14</sup> Pemblokiran terjadi bukan hanya situs web nasional tetapi juga internasional seperti [www.gayanusantara.or.id](http://www.gayanusantara.or.id) dan [www.ilga.org](http://www.ilga.org).

Penghapusan *cyber-homophobia* tersebut sangat berguna bagi IPP mengingat organisasi ini menggunakan internet sebagai salah satu media untuk beradvokasi. IPP memiliki sebuah website bernama [www.pelangiperempuan.or.id](http://www.pelangiperempuan.or.id) dimana didalamnya berisikan artikel, e-book, berbagai karya tulis yang berkaitan dengan kaum LGBT. Didalam website tersebut juga terdapat berbagai kontak yang dapat digunakan oleh masyarakat luas dalam mencari informasi mengenai kaum LGBT, kabar seputar LGBT, hingga advokasi yang telah dilakukan oleh IPP.

## **B. Pembahasan *Yogyakarta Principles* dalam Panel Internasional**

Peluncuran *Yogyakarta Principles* pada 26 Maret 2007 bertepatan dengan acara *United Nations Human Rights Council* di Jenewa yang dihadiri oleh perwakilan delegasi negara, mantan komisaris tinggi PBB untuk HAM, *Special Procedure* PBB,

---

<sup>13</sup> Kamilia Manaf, Dewi Nova Wahyuni, dan Ikram Baadila, “*Queering Tata Kelola Internet di Indonesia*”, diakses pada 22 Agustus 2017.

<sup>14</sup> *Ibid.*

anggota badan traktat, para ahli dan perwakilan NGO. Pertemuan tersebut memiliki maksud untuk memindahkan *Yogyakarta Principles* kedalam agenda internasional. Selain itu juga membahas rencana *Yogyakarta Principles* yang akan dipresentasikan dalam sebuah pertemuan di Markas PBB di New York pada 7 Nopember 2007. Pertemuan tersebut diselenggarakan oleh pemerintah dari Brazil, Argentina, dan Uruguay yang bekerjasama dengan *The Third Committee of the General Assembly* dan akan dihadiri sekitar 20 negara.<sup>15</sup>

Pada bulan November 2008, *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) mengeluarkan catatan sebanyak 18 halaman yang berisi petunjuk mengenai perlindungan dan pencari suaka dimana didalamnya mengutip *Yogyakarta Principles* yang menjelaskan tentang bagaimaa SOGI dapat dijadikan dasar penganiayaan.<sup>16</sup> Sebagai tambahan, dokumen tersebut menyatakan bahwa orientasi seksual tidak digambarkan secara eksplisit dalam setiap perjanjian Hak Asasi Manusia. Selain itu pada bulan Oktober 2009, *Division of International Protection Service of the United Nations High Commissioner for Refugees* menerbitkan kumpulan instrumen-instrumen yang relevan mengenai SOGI yang dapat digunakan dalam kasus klaim oleh pengungsi.<sup>17</sup>

Pada Desember 2009, Office of the *United Nations High Commissioner for Human Rights (UNHCHR)* menerbitkan *Strategic Plan* untuk tahun 2010-2011 dimana didalamnya *Sexual Orientation and Gender Identity (SOGI)* menjadi salah satu isu yang

---

<sup>15</sup> International Service for Human Rights, Human RightsWatch and International Gay and Lesbian Human Rights Commission, “*Launching the Yogyakarta Principles*” dalam Michael O’Flaherty dan John Fisher. “*Sexual Orientation, Gender Identity and International Human Rights Law: Contextualising the Yogyakarta Principles.*” *Op. Cit.*

<sup>16</sup> Paula L. Etterbrick, Esq. Dan Alia Trabucco Zeran. “*The Impact of the Yogyakarta Principles on International Human Rights Law Development*”, diakses dari [http://www.ypinaction.org/wp/wp-content/uploads/2016/10/Yogyakarta\\_Principles\\_Impact\\_Tracking\\_Report.pdf](http://www.ypinaction.org/wp/wp-content/uploads/2016/10/Yogyakarta_Principles_Impact_Tracking_Report.pdf) pada 4 Januari 2017.

<sup>17</sup> Paula L. Etterbrick, Esq. Dan Alia Trabucco Zeran. “*The Impact of the Yogyakarta Principles on International Human Rights Law Development*”, *Op. Cit.*

menjadi prioritas dalam dua tahun kedepan. Louis Arbour secara terbuka mendukung *Yogyakarta Principles* dengan merilis sebuah pernyataan pada peluncurannya dan menegaskan bahwa akan memperkenalkan dan melindungi Hak Asasi Manusia terlepas dari SOGI. UNHCHR di Nepal telah menyatakan dukungan terhadap peluncuran *Yogyakarta Principles* dalam bahasa Nepal.<sup>18</sup>

Selain itu *Yogyakarta Principles* juga dikutip oleh *Committee on Economic, Social, and Cultural Rights* (CESCR) dalam General Comment pada 25 Mei 2009.<sup>19</sup> Komite tersebut mengutip definisi identitas gender yang ada didalam *Yogyakarta Principles*. Meskipun tidak mengutip sebuah prinsip secara spesifik, penggunaan definisi ini dalam perjanjian resmi PBB dapat menyoroti penggunaan sebanyak mungkin dari *Yogyakarta Principles* dan mendapatkan posisi tersendiri dengan PBB.

*Joint United Nations Programme on HIV/AIDS* (UNAIDS) juga mengadopsi definisi dari orientasi seksual dan identitas gender dalam *Review of Legal Frameworks and the Situation of Human Rights related to Sexual Diversity in Low and Middle Income Countries*.<sup>20</sup>

*United Nations Office on Drugs and Crimes* juga telah menggunakan *Yogyakarta Principles* secara ekstensif dalam sebuah buku yang berjudul *Prisoners with Special Needs*. Buku tersebut mengutip tiga sumber, yaitu *Universal Declaration on Human Rights*, *International Covenant on Civil and Political Rights*, serta *Yogyakarta Principles* (khususnya prinsip 9).<sup>21</sup>

Selain dalam panel internasional melalui badan PBB, *Yogyakarta Principles* juga telah direferensikan kepada masyarakat sipil dalam pernyataan-pernyataan yang

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*



dimuat dalam Summit Africa-Europe pada 2007 silam.<sup>22</sup> Sedangkan dalam ruang lingkup regional juga dilakukan oleh badan regional ILGA untuk masing-masing kawasan, yaitu:<sup>23</sup>

- Afrika, dipresentasikan dalam konferensi ILGA di Johannesburg pada May 2007 yang bertemakan *International Dialogue on Gender, Sexuality, HIV/AIDS and Human Rights*. Presentasi dilakukan oleh *ARC International dan Coalition of African Lesbians*.
- Amerika Latin, dipresentasikan dalam konferensi *International Association for the Study of the Sexuality, Culture, and Society (IASSCS)* di Peru pada Juni 2007 dan dimuat dalam konferensi ILGA di Peru pada September 2007.
- Eropa Timur, dipresentasikan dalam konferensi ILGA Europe di Lithuania pada 25-28 Oktober 2007.
- Asia., dipresentasikan dalam konferensi ILGA Asia di Thailand pada 24-27 Januari 2008.

ILGA sebagai salah satu anggota Dewan Konsultatif Badan *ECOSOC (Economic and Social Council)* PBB memiliki hak untuk memberikan sebuah pernyataan pada setiap panel PBB. Hak keistimewaan tersebut sangat tidak disia-siakan oleh ILGA dengan membawa *Komik Yogyakarta Principles* untuk dipresentasikan kedalam panel PBB atau tepatnya dalam pertemuan *Commission on the Status of Woman (CSW) ke-55* di New York, Amerika Serikat pada Januari 2012.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> International Service for Human Rights, Human RightsWatch and International Gay and Lesbian Human Rights Commission, "*Launching the Yogyakarta Principles*" dalam Michael O'Flaherty dan John Fisher. "*Sexual Orientation, Gender Identity and International Human Rights Law: Contextualising the Yogyakarta Principles.*" *Op. Cit.*

<sup>23</sup> Michael O'Flaherty dan John Fisher. "*Sexual Orientation, Gender Identity and International Human Rights Law: Contextualising the Yogyakarta Principles.*" *Op. Cit.*

<sup>24</sup> Institut Pelangi Perempuan. "*Komik Yogyakarta Principles Diluncurkan di Brussels, Belgia*", *Op. Cit.*

